

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan pemerintah yang memiliki kemampuan professional. Selain itu, pembangunan daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga terwujudnya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Dina dkk, 2018).

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal Human Development Indeks (HDI) merupakan suatu konsep dari program UNDP untuk menanggulangi kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita yang ingin diraih setiap daera. Peningkatan pembangunan manusia yang ditunjukkan dari IPM yang meningkat mencerminkan indeks pembangunan manusia yang terjadi di kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara

Tahun	IPM
2015	62,97
2016	63,83
2017	64,19
2018	64,54
2019	65,34
2020	65,31
2021	65,56
2022	66,20

Sumber : BPS data diolah

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2015-2022. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Halmahera Utara sebesar 62,97 dan tahun 2016 sebesar 63,83, tahun 2017 sebesar 64,19 dan tahun 2018 IPM Kabupaten Halmahera Utara sebesar 64,54 dan tahun 2019 sebesar 65,34, pada tahun 2020 sebesar 65,31 dan pada tahun 2021 sebesar 65,56, pada tahun 2022 sebesar 66,20. Jika dilihat berdasarkan data tabel diatas laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015-2022 ini mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti pembangunan manusia Hamahera Utara terus mengalami kemajuan.

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pelaksanaan pembangunan pada setiap daerah merupakan bagian dari terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah ini memberikan hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Alfan Fuad M; 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah, dimana dana tersebut diperoleh dari masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tersebut (Rahmawati Dedek; 2022). Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin luas komposisi PAD, semakin besar kapasitas pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, semakin kecil komposisi pendapatan daerah relatif terhadap pendapatan daerah, semakin besar ketergantungan pada pusat. Dampak masyarakat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan yang lancar, pembangunan meliputi berbagai sektor antara lain pembangunan jalan, pembangunan umum dan fasilitas lainnya.

Menurut Mubarrizi (2021), dalam Islam negara memiliki hak untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi individu, baik untuk mengontrol dan mengatur kegiatan atau terlibat dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi di mana tidak semua individu dapat berpartisipasi. Intervensi negara dalam masalah perekonomian rakyat. Peran pemerintah daerah selalu diharapkan mampu mengoptimalkan peluang Kabupaten/Kota. Sehingga peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat semakin diperkuat di masa mendatang. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak dan industri PAD lainnya sehingga secara bersama-sama dapat menopang pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi juga bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Taraf perubahan hidup masyarakat mulai dari segi pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari didasarkan pada penggunaan pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat meningkat apabila kondisi pertumbuhan di suatu daerah bertambah. Suatu daerah dapat disebut maju secara ekonomi apabila mengalami pertumbuhan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, inflasi juga juga berdampak kuat terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan diiringi naiknya suatu barang yang akan berdampak pada produktivitas bahan baku.

Sukirno (2011), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan dalam perkembangan ekonomi yang berakibat pada bertambahnya jumlah produksi barang dan jasa dalam masyarakat tersebut sehingga terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat. Selain itu, Sukirno (2011), juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai dari adanya perkembangan produk barang ataupun jasa yang berakibat pada adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, bertambahnya industri yang ada di Indonesia, bertambahnya modal. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah baik hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti adanya peningkatan pendapatan perkapita, banyaknya fasilitas yang dibangun atau bahkan diperbaiki, tidak hanya itu peningkatan pendidikan yang tergolong baik.

Menurut Jhingan (2000), pembangunan ekonomi adalah salah satu

dari berbagi upaya yang ada, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menuju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sehingga setiap perencanaan dalam pembangunan akan mempertimbangkan semua potensi ekonomi. Perencanaan pembangunan dipandang sebagai pedoman atau panutan agar dapat menghasilkan pembangunan ke arah yang positif atau dengan kata lain dapat dijadikan sebuah jembatan dalam perekonomian apabila pemerintah mengharapkan keberhasilan yang lebih baik (Halim, 2002). Maka dari itu, suatu perencanaan yang matang dalam sebuah upaya pembangunan menjadi unsur yang penting demi meningkatnya indeks pembangunan manusia yang lebih baik.

Gejala pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB dapat menggambarkan aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dan dapat dicapai pada satu periode. Menurut Hasan (2012) dalam Sugiarti dan Suparmi (2014), pertumbuhan ekonomi adalah sebuah alat ukur dari sebuah pembangunan karena perkembangan aktivitas sektor ekonomi dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Secara makro apabila pada suatu daerah, produksi barang dan jasanya meningkat maka setiap tahunnya tercermin pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun, sedangkan secara mikro tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994). Mengamati pada data statistik, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersaji dua kategori penilaian diantaranya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Besaran atau jumlah PAD yang diterima suatu daerah sebaiknya tidak menjadi ukuran dari pergerakan aktivitas perekonomian, namun diukur dari sejauh mana PAD tersebut dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerah, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi indeks pembangunan manusia (Sidik,2000) dalam Maryati dan Endrawati (2010). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap indeks pembangunan manusia Di Kabupaten Halmahera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian in adalah:

1. Apakah variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara?
2. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara
2. Untuk mengetahui variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua

pihak, yaitu antara lain :

1. Manfaat bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah khususnya untuk lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia yang lebih adil dan merata.
3. Memberikan referensi bagi pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.